

BAB II

Muhammadiyah dan Globalisasi

Keunikan dari subjek analisa dalam penelitian ini membuat penelitian ini menjadi sangat menarik dan sekaligus menantang. Peneliti katakan menarik karena sejauh literatur yang tersedia memang baru penelitian ini yang secara fokus menggali bagaimana praktik dan proses internasionalisasi kelembagaan Muhammadiyah. Konsekuensinya, sebagai peneliti yang terjun pada subjek yang tidak menyediakan literatur yang kaya pada subjek tersebut, tentu saja akan menguji kejelian peneliti dalam menyoroti praktik transnasionalisasi organisasi masyarakat islam terbesar ke-2 di negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Kejelian ini adalah kecermatan memposisikan Muhammadiyah dengan menghubungkannya pada konsep dan praktik internasionalisasi LSM/organisasi dan gerakan sosial.

Dengan kata lain, penelitian ini merupakan sebuah inovasi menggunakan pisau analisa internasionalisasi yang memiliki banyak irisan dengan konsep-konsep seperti globalisasi, transnasionalisme dan diaspora untuk menjelaskan proses internasionalisasi kelembagaan (perluasan cabang) Muhammadiyah yang belum dituliskan secara komprehensif sebagai sebuah proyek riset oleh siapapun sebelumnya. Maka dari itu, sebelum masuk pada penjelasan pokok dari riset ini mengenai kebijakan internasionalisasi Muhammadiyah lewat pengembangan PCIM nya, diperlukan sebuah penyajian argumentasi yang runut mengenai

bangunan ideologi seperti apa yang mengakar pada Muhammadiyah sehingga ide transnasionalisasi bisa lahir dan dijalankan selama lebih dari 10 tahun terakhir.

Bab dua dalam penelitian ini akan menyajikan dua sub pembahasan, yaitu;

1.) Dinamika ideologi Muhammadiyah yang mendorong lahirnya internasionalisasi kelembagaan Muhammadiyah, 2.) lalu, yang kedua, dengan membedah beberapa teori mengenai globalisasi, transnasionalisme, diaspora, gerakan sosial, masyarakat sipil, dan developmentalisme, peneliti kemudian merelevansikannya dengan praktik internasionalisasi Muhammadiyah.

1. Dinamika Muhammadiyah

Berusia lebih dari satu abad, Muhammadiyah dengan konsistensi ideologi *Al-Ashr* tidak berhenti menjadi penyangga ranah pendidikan dan kesehatan bangsa Indonesia lewat ribuan institusi pendidikan dan ratusan klinik dan rumah sakit yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Hal ini meneguhkan kontribusi sosial Muhammadiyah yang tidak sembarangan. Di sisi lain, meskipun Muhammadiyah bukan organisasi yang secara politik partisan, namun tidak bisa dibantah bahwa Muhammadiyah memiliki pengaruh penting dalam proses politik di Indonesia, terutama pasca runtuhnya rezim tiran Soeharto.

Mengakarnya aspek gerakan islam yang sosial, transformatif, dan pada konteks tertentu juga politis, tentu dilandasi oleh sebuah kerangka ideologi yang kuat. Dan, atas dasar kerangka ini jugalah ormas islam terbesar kedua di Indonesia ini dapat merespon arus globalisasi dan perkembangan teknologi dan informasi dengan turut andil menjadi

pemain di dalamnya. Tatanan nilai inilah yang dijadikan pijakan Muhammadiyah dalam merespon formasi globalisasi—tidak hanya sebagai pengamat atau penonton namun juga sebagai pemain—melalui partisipasi aktif individu/lembaga naungan Muhammadiyah di berbagai isu internasional (seperti keterlibatan MDMC dalam berbagai forum *disaster management* di tingkat global), kerja sama PP Muhammadiyah dan kampus-kampus Muhammadiyah dengan berbagai universitas di Eropa, US, Asia, Australia, hingga Afrika, dan juga melalui pengembangan cabang Muhammadiyah di banyak negara di berbagai belahan dunia (yang menjadi subjek khusus penelitian ini).

Penelusuran historis dan analisa dinamika Muhammadiyah akan menjelaskan tatanan nilai seperti apa yang dijadikan tumpuan oleh Muhammadiyah sehingga dapat lahir respon-respon progresif Muhammadiyah dan kader-kadernya terhadap arus cepat globalisasi yang membuat jarak antar Negara-bangsa semakin terkikis. Sebuah buku yang ditulis oleh ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, yang berjudul *Ideologi Muhammadiyah (2014)* menjadi literatur penting yang relevan dalam kondisi dunia Islam yang kompleks dan semakin banyak terfragmentasi dalam berbagai kelompok—baik di dalam maupun luar negeri.

Pertama, Haedar Nashir dalam buku ini mengajak Muhammadiyah untuk tidak menutup mata pada realitas gerakan islam di aras global yang semakin terfragmentasi. Kenyataan pluralitas gerakan dan

ideologi islam kontemporer dia akui turut mempengaruhi pula gerak Muhammadiyah namun menjadi penting bagi Muhammadiyah untuk menggali dan memperkuat ideologi yang selama ini dipegangnya dalam rangka memastikan Muhammadiyah yang “kini” tetap berjuang sesuai *khittahnya* dalam membentuk peradaban masyarakat yang islami—*Islamic society* bukan *Islamic state*. (Haedar Nashir, 2014). Sederhananya, penguatan ideologi Muhammadiyah harus dibarengi dengan pembacaan pada realitas masyarakat islam kontemporer—baik di tingkat nasional, regional, maupun global—yang kompleks dan juga sangat beragam.

Haedar Nashir melihat ini sebagai sebuah pertemuan antara pengalaman panjang organisasi dan situasi terkini politik islam yang semakin meng-global dan mensyaratkan semakin besarnya partisipasi Muhammadiyah pada ranah internasional. Apa yang ditulis oleh Haedar Nashir dalam bukunya ini bukanlah sebuah anjuran untuk Muhammadiyah namun sebuah refleksi atas apa yang selama ini dilakukan Muhammadiyah. Artinya, sikap keterbukaan Muhammadiyah terhadap perkembangan zaman adalah bagian dari dinamika gerak Muhammadiyah itu sendiri semenjak ia lahir dan terutama di abad 21 ini.

Selanjutnya, yang perlu digali lebih dalam adalah pondasi atau kerangka nilai/ideologi seperti apa yang disebut oleh Haedar sebagai nilai penting yang dapat menjaga Muhammadiyah dapat bergerak

sesuai *khittahnya* dan membuat Muhammadiyah begitu tanggap terhadap perubahan sosio-politik dan kebudayaan yang begitu cepat. Masih di buku yang sama, Haedar Nashir membagi dimensi ideologi Muhammadiyah ke dalam enam kategori (Haedar Nashir, 2014), yaitu:

Pertama, ideologi gerakan Muhammadiyah merupakan sistem paham dan teori perjuangan yang dilandasi, dijiwai, dan dibingkai serta dimaksudkan untuk mengamalkan islam dalam seluruh kehidupan manusia (*islam rahmatan lil-alamin*). Dimensi pertama ini, menurut peneliti, sebenarnya menjadi salah satu penjelas mengapa Muhammadiyah dapat secara aktif menyambut globalisasi dengan upaya internasionalisasi kelembagaan. Aspek inklusivitas nilai-nilai islam yang dapat diberlakukan pada seluruh umat manusia tanpa dominasi dan tanpa memaksa orang mengganti agamanya mendorong perspektif dakwah dan perjuangan sosial Muhammadiyah melampaui sekat-sekat sektarian yang juga di saat yang sama dapat melampaui sekat-sekat geografis saat kondisi materialnya (teknologi, finansial, kader) memungkinkan. Dimensi pertama ideologi Muhammadiyah ini menjelaskan kenapa agenda internasionalisasi Muhammadiyah dapat berlangsung dengan dukungan penuh kelembagaan dari tingkat pusat hingga cabang.

Kedua, ideologi gerakan Muhammadiyah adalah *manhaj* (sistem/metode) dakwah islam untuk mengajak manusia beriman kepada Allah swt serta *amar ma'ruf nahi munkar*. Dimensi kedua ini

juga menjadi pijakan ideologis penting bagi Muhammadiyah dalam menjalankan agenda transnasionalisasi lembaga dan idenya. Semangat berdakwah dan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak pada kebaikan dan mencegah keburukan) yang diusung oleh Muhammadiyah memang tidak membatasi dirinya dengan batasan etnis, ras, agaman, dan daerah ataupun Negara. Semangat inilah yang juga digaungkan Muhammadiyah dalam partisipasinya pada isu-isu global maupun dalam upayanya memperluas cabang di luar negeri.

Ketiga, ideologi gerakan Muhammadiyah ialah sistem dan teori perjuangan islam untuk *tajdid* (pembaruan) sehingga selalu terbuka pada kritik dan memiliki agenda perubahan ke arah kemajuan (*ishah*). Dimensi inilah yang bisa dikatakan salah satu distingsi terkuat antara Muhammadiyah dibanding gerakan-gerakan islam yang lainnya di Indonesia. Ciri modernis/reformis pada Muhammadiyah sudah melekat kuat semenjak organisasi ini lahir lewat upaya dekonstruksi kebudayaan dan agama yang seringkali memberatkan para penganutnya (dalam konteks religius dan kultural). Sifat modernis ini tetap menjadi identitas Muhammadiyah hingga hari ini, termasuk dalam konteks sosial-politik dan kebudayaan dalam konteks globalisasi. Usaha-usaha penciptaan *Islamic society* untuk mencapai kemajuan yang dilakukan dengan semangat mengglobalkan Muhammadiyah—termasuk dengan perluasan cabang di luar negeri—merupakan salah satu ciri modernis Muhammadiyah.

Keempat, ideologi Muhammadiyah memiliki kerangka pemikiran dalam; Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, *Khittah* Muhammadiyah, dan Pedoman hidup islami warga Muhammadiyah. Kelima hal di atas adalah prinsip-prinsip elementer dalam tubuh Muhammadiyah sebagai organisasi massa Islam yang di atas kelima prinsip tersebut ideology Muhammadiyah bertumpu. Seluruh prinsip tersebut (mulai dari anggaran dasar hingga ke *khittah* Muhammadiyah) mengakomodasi ide internasionalisasi gerakan Muhammadiyah terutama internasionalisasi dalam artian perluasan cabang (PCIM) ke berbagai Negara di luar Indonesia. Artinya, secara prinsip dan aturan, konsep dan praktik internasionalisasi menemukan “penyokong” nya.

Kelima, ideologi gerakan Muhammadiyah merupakan teori dan strategi perjuangan Islam yang menyeluruh dan mencakup seluruh aspek kehidupan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Dimensi kelima ini juga menjadi pondasi penting bagi ideology Muhammadiyah dan sekaligus pondasi bagi proyek internasionalisasi Muhammadiyah yang ditujukan pada pengembangan berbagai bidang. Kerangka berpikir Muhammadiyah yang tidak sebatas pada aspek-aspek dakwah spiritual dan tauhid melainkan juga pada aspek pengembangan teknologi, sains, ekonomi, dan sosial-politik menjadi landasan penting bagi proyek transnasionalisasi

lembaga Muhammadiyah yang tujuan akhirnya adalah terwujudnya *Islamic society* atau masyarakat islam yang sebenar-benarnya.

Keenam, ideologi gerakan Muhammadiyah merupakan tali pengikat gerakan yang diwujudkan dalam sistem organisasi, jama'ah, kepemimpinan, dan gerakan amal usaha untuk menjadikan islam sebagai *rahmatan lil alamin* di muka bumi ini. Dimensi ideologis terakhir ini merupakan salah satu dimensi terpenting bagi landasan nilai agenda internasionalisasi kelembagaan Muhammadiyah dimana ada penekanan pada pentingnya wadah perekat ikatan kader Muhammadiyah dimana pun mereka tinggal. Pada titik inilah diaktifkannya cabang istimewa Muhammadiyah di luar negeri bagi kader Muhammadiyah dan umat muslim di wilayah tersebut untuk berkomunitas menemukan relevansi dan urgensinya.

Keenam dimensi ideologis Muhammadiyah yang dipaparkan oleh Haedar Nashir juga menggambarkan posisi ideologis apa yang dipijak Muhammadiyah selama satu abad lebih bergerak untuk umat manusia yang sekarang kontribusi dan kehadirannya telah melampaui batas Negara-bangsa (didirikannya cabang-cabang istimewa Muhammadiyah di berbagai belahan dunia). Jadi, kebutuhan pemahaman akan kerangka ideologi Muhammadiyah beserta dinamika organisasi yang berlangsung selama lebih dari satu abad untuk menjelaskan ide dan praktik internasionalisasi Muhammadiyah dapat dipenuhi melalui paparan argumentasi di atas.

2. Teori-teori

Menjadi penting dalam penelitian ini untuk mendudukan pijakan teoritis peneliti dalam penggunaan konsep dan praktik internasionalisasi, yang dalam sejarahnya, digunakan secara bergantian dan beririsan dengan globalisasi, diaspora, dan transnasionalisasi. Selanjutnya, bagaimana mengkaitkan konsep dan praktik tersebut dengan gerakan Muhammadiyah. Dalam riset ini, peneliti akan merespon dua hal di atas dengan menggunakan teori masyarakat sipil dan gerakan sosial yang mengambil langkah “perluasan” gerakannya dengan melampaui batas-batas geografis.

Tentu saja ada banyak sekali teori gerakan sosial—dimana tidak semuanya relevan untuk dipakai dalam melihat sepak terjang Muhammadiyah—dan begitu juga dengan teori masyarakat sipil, globalisasi, transnasionalisasi atau internasionalisasi yang digunakan pada pelbagai dimensi kajian sosial politik dan ekonomi. Karena itu, dalam upaya mencari kerangka teoritis yang relevan untuk membaca praktik internasionalisasi kelembagaan Muhammadiyah, peneliti akan membedah teori masyarakat sipil, gerakan sosial dan globalisasi/transnasionalisme lalu mencari pertautan yang dapat menjelaskan gerakan sosial yang meng-globalkan gerakannya yang memiliki karakter yang mirip dengan Muhammadiyah.

2.1. Globalisasi, Transnasionalisme, & Diaspora

Valentine M. Moghadam, dalam pengantar bukunya—*Globalization and Social Movements; Islamism, feminism, and the global justice movement*—mendefinisikan globalisasi sebagai sebuah proses ekonomi, politik, budaya, dan geografis yang kompleks dimana mobilitas modal, manusia, organisasi, gerakan, ide, dan diskursus semakin mengambil bentuk yang transnasional dan meng-global.¹ Lebih jauh lagi, Moghadam menjelaskan bahwa proses globalisasi telah membawa umat manusia hidup pada situasi ketidak amanan, ketidak stabilan, penuh risiko, dan penuh kekerasan yang dilakukan baik oleh militer maupun aktor non-negara. Keseluruhan efek bawaan globalisasi ini menurut Moghadam juga membawa semacam penangkal dari efek negatif tersebut, yaitu peluang solidaritas global. Solidaritas ini yang nantinya lahir dalam berbagai bentuk gerakan sosial transnasional untuk meng-*counter* isu-isu tertentu.

Dr Marjorie Mayo, aktivis perempuan yang juga staff pengajar di University of London, menjelaskan bahwa globalisasi bukanlah sebuah peristiwa tunggal yang baru terjadi di penghujung abad 20. Globalisasi memiliki presedennya, mengutip laporan UNDP tahun 1999, Mayo menjelaskan

¹ Valentine M. Moghadam, *Globalization and Social Movements; Islamism, feminism, and the global justice movement* (Maryland, Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 2009)

bahwa globalisasi bukanlah barang baru, kita telah mengalaminya pada awal abad 16 dan akhir abad 19. Namun, era globalisasi kali ini berbeda dengan cakupan pasar baru, alat-alat baru (termasuk internet), dan juga munculnya aturan & aktor baru seperti *World Trade Organization* (WTO), *Multi National Corporation* (MNC), jaringan global *Non-Governmental Organization* (NGOs), dan kelompok-kelompok lain yang bergerak melampaui batas-batas geografis nasional.²

Penjelasan Dr Mayo di atas secara tidak langsung membuktikan bahwa globalisasi sebagai sebuah *terma* memiliki varian yang beragam dan multi dimensi. Saat mengulas lebih dalam tentang perspektif dan definisi globalisasi pada bab pertama bukunya, Dr Mayo menekankan bahwa globalisasi adalah sebuah istilah yang dipertentangkan karena istilah ini melandasi begitu banyak makna dan berbagai tingkat signifikansi yang berbeda, tergantung dari sudut pandang teoritis apa yang dipakai.³ Lebih jauh lagi, Dr Mayo memberikan catatan kritis terhadap globalisasi dengan mengutip M. Edwards (2001: 1) yang berkata: *Kita bisa saja bermimpi tentang suatu komunitas/masyarakat global, namun kita (sekarang) belum hidup pada kondisi tersebut, dan seringkali, tata kelola dunia berarti sebuah sistem dimana*

² Marjorie Mayo, *Global Citizens; Social Movements & the Challenge of Globalization* (London, Zed Books Ltd, 2005)

³ Marjorie Mayo, *Global Citizens; Social Movements & the Challenge of Globalization*, hal 13

*hanya pihak yang kuat yang direpresentasikan dan hanya yang lemah yang dihukum. Mengatasi kekurangan ini adalah tugas paling esensial pada abad ke-21 ini.*⁴

Catatan itu menekankan bahwa globalisasi adalah bentuk kontemporer dari imperialisme global. Hal serupa juga yang dikatakan oleh Moghadam dan banyak intelektual-aktivis lainnya tentang globalisasi. Saat menjelaskan ini, Mayo mengutip apa yang ditulis A. Murray dalam bukunya, *Flashpoint: A World War III (1997)*, yaitu “globalisasi merupakan sebuah kelanjutan dari relasi kuasa ekonomi dunia yang telah ada, dimana para pengendali kapital di kekuatan-kekuatan besar dunia mencoba untuk memperkuat dan melanggengkan eksploitasi mereka pada seluruh dunia”.⁵

Dr Mayo menambahkan, bahwa globalisasi merupakan istilah yang sangat ideologis dan dia juga mengkritik orang-orang yang menganggap globalisasi sebagai sebuah proses yang tak terhindarkan, menggiurkan, dan menguntungkan bagi peradaban umat manusia dengan menyebut para pemuja globalisasi ini sebagai *globaloney*. Kritik terhadap globalisasi ini memang lebih banyak berpusat pada tataran ekonomi dan politik. Definisi lain globalisasi, sebagaimana tercatat dalam *World Development Report* yang ditulis oleh Bank Dunia

⁴ Ibid hal 5

⁵ Ibid hal 14

(2002), berfokus pada globalisasi sebagai bentuk perkembangan teknologi dalam komunikasi yang memungkinkan diketahuinya apa yang terjadi pada suatu pemukiman, pabrik, atau pasar saham di belahan dunia yang lain.⁶

Penjelasan lain tentang globalisasi di luar aspek ekonomi politik juga dilakukan oleh Cohen dan Kennedy yang memulai uraiannya dengan mengutip definisi globalisasi menurut Albrow. Menurut Cohen dan Kennedy, Albrow mendefinisikan globalisasi sebagai keseluruhan proses-proses yang dengannya umat manusia di dunia disatukan ke dalam satu komunitas masyarakat, yaitu masyarakat global (Cohen dan Kennedy 2000: 4).⁷ Cohen dan Kennedy tidak berhenti di sini. Mereka memperdalam diskursus mengenai globalisasi dengan memberikan kategorisasi-kategorisasi lebih dalam.

Kategori ini berupa enam komponen yang mereka anggap melekat pada globalisasi;⁸ 1.) Perubahan konsep tentang ruang dan waktu, 2.) Semakin intensifnya interaksi kultural, 3.) Terciptanya kesadaran tentang adanya masalah bersama dalam warga dunia, 4.) Meningkatnya hubungan dan ketergantungan satu negara-bangsa dengan yang lainnya, 5.) Lahirnya jaringan aktor dan organisasi transnasional yang semakin kuat, 6.)

⁶ *Ibid* hal 15

⁷ *Ibid* hal 16

⁸ *Ibid* hal 16 Cohen dan Kennedy

Sinkronisasi seluruh dimensi yang ada dalam cakupan globalisasi. Menariknya, saat menjabarkan lebih dalam mengenai enam komponen di atas, Marjorie Mayo menghubungkannya dengan kemajuan pesat dalam sektor teknologi informasi dimana itu memungkinkan menyempitnya persepsi masyarakat dunia tentang ruang dan waktu (perjalanan antar benua bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat). Kemajuan teknologi dan informasi ini juga memungkinkan suatu proses interaksi kebudayaan dunia yang jauh lebih intensif. Puncaknya, sebuah kesadaran bahwa masalah yang terjadi di satu ruang geografis tertentu mempengaruhi ruang lain di tempat yang berbeda, dan solusi untuk mengatasinya pun memerlukan upaya bersama antar warga dunia.

Kembali menurut Cohen dan Kennedy,⁹ mereka menggunakan dua istilah penting untuk menjelaskan globalisasi sebagai sebuah proses; '*globalisme*' dan '*glokalisasi*'. Globalisme diartikan sebagai nilai-nilai yang membuat lima milyar manusia yang ada di dunia sebagai objek utama suatu diskursus, dimana mereka hidup sebagai *global citizen* atau warga dunia dengan kepentingan bersama dan aksi kolektif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan global. Kemudian, glokalisasi dipakai untuk menggambarkan bahwa

⁹ *Ibid* hal 17

proses globalisasi bukanlah sebuah proses satu arah—global mempengaruhi lokal semata. Sosiolog seperti Robertson (1992: 177) memiliki definisi serupa tentang globalisasi (sebagaimana Cohen dan Kennedy), yang menjelaskan bahwa proses globalisasi adalah arus dua arah dimana terjadi partikularisasi variabel-variabel global dan universalisasi variabel-variabel partikular/lokal.

Merujuk (lagi) kepada Valentine M. Moghadam,¹⁰ globalisasi—baik yang dilihat dari sudut pandang ekonomi politik ataupun dari sudut pandang perkembangan teknologi dan komunikasi—melalui berbagai dimensi di dalam dirinya telah mendorong meningkatnya interaksi antar kebudayaan yang juga berarti meningkatnya kerja sama, saling kesepahaman dan persilangan identitas. Namun, Moghadam juga menekankan bahwa hal tersebut juga telah menimbulkan reaksi perlawanan dari identitas lain yang terancam seperti lahirnya kelompok-kelompok fundamentalis agama yang aktif mengkampanyekan perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai sebuah proses westernisasi. Kelompok religius (islam) inilah yang nantinya disebut sebagai kelompok islamis/jihadis—sebuah kategori gerakan sosial transnasional

¹⁰ Valentine M. Moghadam, *Globalization and Social Movements; Islamism, feminism, and the global justice movement* hal 26-27

yang menjadi kajian khusus dalam diskursus politik internasional.¹¹

Untuk menemukan pijakan teoretis yang tepat bagi penggambaran proses deterritorialisasi tatanan sosial, politik, ekonomi, dan budaya dunia, peneliti akan melakukan kajian terhadap teori transnasionalisme dan diaspora untuk melengkapi teori globalisasi yang telah dijelaskan di atas. Sebagai perangkat analitis, diaspora dan transnasionalisme telah dipakai secara bergantian untuk menjelaskan sebuah proses mobilitas manusia, modal, budaya, ideologi, dan berbagai identitas yang melekat pada suatu kelompok ke berbagai belahan dunia yang didorong oleh berbagai sebab. Alasan ini juga yang mengakibatkan konsep transnasional dan diaspora kadang digunakan untuk menggantikan globalisasi. Ayona Datta, ilmuwan interdisipliner yang mengajar di University of Leeds, menjelaskan bahwa diaspora dan transnasionalisme adalah dua konsep penting untuk memahami kapan, bagaimana, dan pada kondisi seperti apa manusia meninggalkan, menetap, atau kembali ke suatu wilayah dan bagaimana keputusan mereka itu dipengaruhi oleh proses

¹¹ Sebagai catatan, Muhammadiyah yang dikaji dalam penelitian ini tidak termasuk dalam kategori gerakan islam jihadis ini, namun tetap penting membahas gerakan jihadis ini karena kaitannya erat dengan proses globalisasi dan gerakan sosial islam yang melakukan internasionalisasi.

struktural, sosial, politik, budaya, dan subjektif pada tingkatan/skala yang berbeda.¹²

Untuk menarik garis pembeda antara dua konsep ini, para ilmuwan lintas disiplin telah lebih dari empat dekade memperdebatkan ini. Keduanya memang memiliki perbedaan namun juga memiliki irisan-irisan pada konteks tertentu. Kajian yang dilakukan Girish Daswani (2013: 29-53) misalnya mendekati dua konsep ini dengan disiplin antropologi lalu Garret Wallace Brown (2013: 68-87) menggunakan pendekatan isu politik kontemporer, dan Ayona Datta (2013: 88-105) mengkajinya dalam kerangka *urban studies*. Begitu luas dan multi-dimensinya diskursus yang meliputi konsep diaspora dan transnasionalisme ini mengakibatkan pentingnya kecermatan untuk memilah pendekatan mana yang sesuai untuk membaca praktik internasionalisasi kelembagaan dan nilai Muhammadiyah lewat pengembangan PCIM-nya.

Girish Wardani menjelaskan bahwa secara umum diaspora merujuk pada “berbagai bentuk kelompok migran yang meninggalkan tanah kelahirannya namun tetap membawa suatu identitas religius, budaya, dan nasional”.¹³ Pada sisi lain,

¹² Ayona Datta, *Diaspora and Transnationalism in Urban Studies (Chapter 5) in Companion to Diaspora and Transnationalism* (Ato Quayson & Girish Darwani, 2013, Blackwell Publishing)

¹³ Girish Daswani, *The Anthropology of Transnationalism and Diaspora (chapter 2) in Companion to Diaspora and Transnationalism* (Ato Quayson & Girish Darwani, 2013, Blackwell Publishing)

transnasionalisme dapat dideskripsikan sebagai sebuah proses yang mencakup keterlibatan lintas-batas (*trans-border*) antar dua atau lebih negara-bangsa, atau sebuah ruang sosial yang menghubungkan satu atau lebih komunitas migran melalui arus teknologi, barang, keuangan, dan manusia.¹⁴ Melampaui subjek “migran”, Girish juga mengartikan transnasionalisme sebagai sebuah proses dimana tensi dan prinsip yang dianut oleh suatu kelompok yang coba diangkat/dimobilisasi melampaui batas-batas geografis, sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Mengutip Baubock dan Faist (2010), Garrett Wallace Brown menulis; “Kebanyakan dari para sarjana membedakan diaspora dari transnasionalisme dengan menekankan bahwa diaspora secara spesifik merepresentasikan sebuah pergerakan agama atau suatu warga bangsa tertentu, secara paksa atau sukarela, dari satu atau lebih teritori negara-bangsa ke teritori yang lainnya, dimana kelompok ini tetap mempertahankan ikatan imajiner mengenai kampung halamannya (melampaui batas-batas geografis).¹⁵ Analisis ini diperdalam dengan memberikan empat kunci karakteristik yang melekat pada pendefinisian diaspora.¹⁶ Pertama, penggunaan istilah diaspora biasanya melekat pada diskusi mengenai sebab-sebab

¹⁴ *Ibid* Girish Daswani hal 45-46

¹⁵ Garrett Wallace Brown, *Diaspora, Transnationalism, and Issues in Contemporary Politics (chapter 4)*, in *Companion to Diaspora and Transnationalism* (Ato Quayson & Girish Darwani, 2013, Blackwell Publishing)

¹⁶ *Ibid* Garrett Wallace Brown hal 70-71

sekelompok manusia melakukan perpindahan (migrasi) baik yang disebabkan oleh paksaan (karena perang atau ekspansi) maupun yang didorong oleh faktor perdagangan ataupun ketenaga kerjaan (Cohen, 2010). Kedua, diaspora juga digunakan untuk menggambarkan suatu perasaan kuat identitas kelompok tertentu yang berusaha menjaga ide-ide tentang tanah kelahiran/asal juga ikatan politik, sosial, dan budaya yang juga melibatkan hasrat untuk kembali pulang (Safran, 1991). Ketiga, kajian tentang diaspora seringkali berfokus pada bagaimana para migran dapat mengintegrasikan diri ke wilayah “tamu” dan bagaimana mereka sering menerima reaksi negatif dari penduduk setempat dimana mereka bermigrasi (Alba, 2003). Keempat, istilah diaspora juga sering dikaitkan pada pertanyaan-pertanyaan tentang identitas etnis lintas-teritori dan rasa bertanggung jawab/kesaling terhubungan antar anggota yang berdiaspora tersebut (Werbner, 2002).

Pengkategorian karakteristik di atas coba dirangkum oleh Adamson dan Demetriou (2007: 497) dengan menjelaskan bahwa diaspora dapat diidentifikasi sebagai sebuah kolektivitas sosial yang eksis melampaui batas-batas negara dan telah terbukti dari waktu ke waktu melakukan; 1) mempertahankan identitas religius, budaya, dan nasional kolektif melalui penciptaan ikatan internal yang rekat dan merawat ikatan

dengan tanah kelahiran yang asli dan yang imajinatif, 2) menunjukkan kemampuan untuk mengungkapkan kepentingan bersama para anggota kolektivitas sosial melalui kerangka organisasi yang kuat dan jaringan transnasional.

Dari beberapa teori tentang diaspora di atas, peneliti melihat cakupan konsep diaspora yang menjelaskan suatu proses perpindahan manusia dari suatu wilayah teritori tertentu—baik dipicu oleh paksaan maupun secara sukarela—dan bagaimana mereka yang telah pindah tetap menjaga nilai-nilai dan prinsip tertentu (baik nilai/prinsip yang dilandasi oleh identitas etnis maupun nilai religius) ditambah lagi mereka juga memendam hasrat untuk kembali ke asal mereka sangat sesuai untuk menggambarkan motivasi Muhammadiyah yang menyambut era globalisasi melalui kebijakan pengembangan kelembagaan. Muhammadiyah yang memegang teguh prinsip islam sebagai *rahmatan lil alamin* dan dengan semangat mendorong terciptanya *islamic society*—dimana prinsip dan semangat ini memiliki karakter transnasional—dimana anggotanya banyak yang merantau ke berbagai belahan dunia dengan motivasi kerja dan menempuh pendidikan tentu akan menjaga prinsip dan semangat Muhammadiyah di atas. Pada titik inilah para warga Muhammadiyah yang merantau ini mengalami proses diaspora.

Kemudian, untuk mengelaborasi lebih dalam lagi konsep transnasionalisme, penting untuk merujuk kembali pada apa yang ditulis oleh Ato Quayson dan Girish Daswani. Mereka menjelaskan bahwa transnasionalisme mencakup ruang konseptual yang lebih luas dari diaspora, seperti berbagai macam arus dan kontradiksi yang dimunculkannya di tataran regional dan global; manusia, teknologi, mekanisme pasar global, dan gagasan kewarganegaraan.¹⁷ Lebih jauh lagi, mereka menjelaskan bahwa apabila landasan para diaspora biasanya identitas etnis/agama belaka, maka transnasionalisme menggambarkan suatu komunitas global yang diikat oleh identifikasi kelas, seksualitas, dan bahkan ketertarikan profesional tertentu. Karena itu, aktivis lingkungan atau LGBT lintas negara dapat dimasukkan dalam kategori komunitas transnasional. Atau, para pemeluk agama buddha di luar negara-negara yang memiliki akar sejarah buddha seperti China, Jepang, India, dan Thailand yang mengidentifikasi dirinya lewat ritual-ritual, praktik, dan ideologi non-kekerasan lintas negara. Sederhananya, setiap kelompok yang memiliki kesamaan nilai, prinsip dan tujuan (tidak etnis semata) yang terhubung melampaui batas-batas negara-bangsa dapat dikategorikan sebagai komunitas transional.

¹⁷ Ato Quayson & Girish Daswani, *Diaspora and Transnationalism; Scapes, Scales, and Scopes*, in *Companion to Diaspora and Transnationalism* (Ato Quayson & Girish Darwani, 2013, Blackwell Publishing)

Berangkat dari pendefinisian transnasionalisme yang inklusif di atas, maka peneliti melihat kesesuaian penerapan konsep tersebut untuk membaca praktik internasionalisasi kelembagaan Muhammadiyah yang dilandasi nilai-nilai universal (pluralisme, multikulturalisme, demokrasi, dan HAM) yang dapat menghubungkan para diaspora Muhammadiyah dari Indonesia yang menetap di negara tertentu dengan orang-orang lain yang terikat pada prinsip tersebut baik warga asli di negara tempat imigran Muhammadiyah menetap atau warga-warga dari negara tetangga dan benua tetangga.

2.2. Gerakan Sosial

Teorisasi gerakan sosial dalam penelitian ini menjadi cukup penting untuk memperjelas kacamata analisis apa yang dipakai oleh peneliti untuk menjelaskan entitas "gerakan" yang, dalam upaya mencapai tujuannya, mengambil langkah transnasionalisasi gerakannya. Teori ini penting bagi peneliti untuk dipakai bersama dengan teori globalisasi dan transnasionalisasi/diaspora untuk membaca langkah internasionalisasi kelembagaan Muhammadiyah.

Dalam ruang akademis, ada perjuangan yang cukup lama dari para intelektual-aktivis untuk membuat tema gerakan

sosial menjadi subjek khusus dalam kajian ilmu sosial.¹⁸ Pendapat ini serupa dengan apa yang dipaparkan oleh Donatella della Porta dalam bukunya, *Can Democracy Be Saved?*. Menurut Della Porta, ilmu sosial memiliki porsi yang cukup besar bagi literatur yang mengupas pentingnya gerakan sosial dalam proses konstruksi demokrasi, sebaliknya kajian tentang demokratisasi (khususnya di negara dunia ketiga) terlalu berfokus pada peran elit dan prakondisi struktur ekonomi, alih-alih memberikan ruang perhatian akademik pada peran gerakan sosial (dan organisasinya) dalam mempengaruhi arah gerak demokratisasi.¹⁹

Padahal, gerakan sosial telah berkontribusi besar dalam terbentuknya peradaban umat manusia yang egaliter dan demokratis sebagaimana yang telah kita saksikan di banyak negara hari ini. Robert K. Schaeffer secara khusus menekankan gerakan sosial selama berabad-abad terakhir telah menciptakan tiga perkembangan penting—bangkitnya negara-negara berbasis sistem republik, demokratisasi di republik-republik, dan penguatan nilai-nilai kewarganegaraan yang

¹⁸ Lihat David S. Meyer, Chapter I (Introduction); *Opportunities and Identities: Bridge-Building in the Study of Social Movement*, dalam buku *Social Movements: Identity, Culture, and the State* (Oxford press, 2002)

¹⁹ Donatella della Porta, *Can Democracy Be Saved?*, (UK, Polity press, 2013) hal. 125-126

inklusif di republik-republik.²⁰ Secara kategori akademik, gerakan sosial didefinisikan dan dibagi dalam berbagai varian dan dimensi. Robert Schaeffer, misalnya, membagi gerakan sosial di awal kemunculannya ke dalam tiga jenis; gerakan *aspiring*, gerakan altruistik, dan gerakan restriksionis.²¹

Gerakan *aspiring* diartikan gerakan yang dimotori oleh dan untuk sekelompok warga yang termarginalkan oleh ekspresi kultural, politik, dan ekonomi rezim penguasa yang membuat mereka menjadi warga kelas dua. Contohnya, perempuan di Amerika sebelum mereka memiliki hak politik, warga kulit hitam yang terimbas sistem apartheid, warga dengan pilihan aliran kepercayaan/orientasi seksual minoritas yang haknya diberangus oleh negara, dan banyak kelompok marginal lainnya. Gerakan ini biasanya melakukan tekanan vertikal untuk mempengaruhi kebijakan dan perubahan aturan dengan tujuan akhir mengangkat status sosial, politik, budaya, dan ekonomi mereka menjadi setara dengan warga lain atau sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.²²

Selanjutnya, gerakan altruistik adalah gerakan yang dimotori oleh kelompok sosial yang tidak mengalami penindasan atau para *citizen (the privileged ones)* untuk

²⁰ Robert K. Schaeffer, *Social Movement and Global Social Change: The rising tide*, (UK, Rowman & Littlefield, 2014)

²¹ *Ibid* Robert K Schaeffer hal 9

²² *Ibid* Robert K Schaeffer hal 9-10

membantu para *denizen* (kelompok tertindas atau *subaltern*) mencapai hak-hak mereka.²³ Terakhir adalah apa yang disebut sebagai gerakan restriksionis. Sebagaimana namanya, gerakan restriksionis adalah gerakan yang berujuan me-restiksi atau membatasi laju perkembangan demokratisasi, mempertahankan status quo, menjaga ketimpangan sosial, menentang diberikannya hak sipil yang utuh bagi kelompok minoritas tertentu, dan berbagai aksi konservatif lainnya. Mereka seringkali beraksi dengan medium kekerasan yang mereka dapat dengan klaim sepihak otoritas penggunaan kekerasan sebagaimana yang dilakukan kelompok-kelompok ormas atau vigilante tertentu.²⁴

Pendekatan lain dalam memahami gerakan sosial bisa dilakukan dengan melihat kemunculannya terhadap tatanan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang bermasalah, menindas atau timpang. Pada abad ke 20, gerakan ini mulai menemukan bentuknya yang melampaui batas-batas geografis, etnis, budaya, dan bahkan ideologi. Gerakan sosial dalam bentuk jaringan internasional atau organisasi tingkat regional/global ini menurut Marjorie Mayo mulai diakui signifikansinya secara global pada awal abad ke-21.²⁵ Apabila paragraf sebelumnya

²³ *Ibid* Robert K Schaeffer hal 10-11

²⁴ *Ibid* Robert K Schaeffer hal 11-12

²⁵ Marjorie Mayo, *Global Citizens: Social Movements & The Challenge of Globalization*, (New York, Zed books, 2005) hal 1

menjelaskan gerakan sosial dengan cara mengklasifikasikan jenis-jenisnya, maka apa yang dilakukan Marjorie Mayo dan banyak intelektual-aktivis lainnya adalah menjelaskan gerakan sosial global sebagai bentuk resistensi terhadap eksekusi negatif dari globalisasi.

Lebih jauh lagi, Mayo menjelaskan fenomena protes ini sebagai gerakan sosial anti-globalisasi dimana bermunculan protes-protes terhadap kebijakan neoliberal yang dipromosikan oleh tatanan politik ekonomi dunia baru—IMF, WTO, Bank Dunia, OECD, dll—baik di negara maju maupun di negara-negara dunia ketiga. Aktor yang mendorong aksi-aksi ini pun, menurut Mayo, berasal dari berbagai kelas sosial dan ekonomi mulai dari doktor, pegawai negeri, aktivis serikat dagang, guru, aktivis buruh, buruh, pengangguran dan petani miskin.²⁶

Variabel lain yang dibahas dalam diskursus gerakan sosial di era globalisasi adalah peran baru yang dimainkan aktor masyarakat sipil—khususnya NGO. Melihat jaringan dan sumber daya NGO yang luas dan besar, NGO dipandang telah berkontribusi besar dalam proses demokratisasi dan mobilisasi melawan neoliberalisme global—lewat penyediaan dana riset dan pelayanan langsung pada masyarakat yang terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah yang pro pasar dan memotong

²⁶ *Ibid* Marjorie Mayo hal 2-3

ongkos sosial pelayanan publik. Namun, mengutip Davis (201) dan Edwards (2001), masyarakat sipil tidak seharusnya dilihat sebagai *thing* atau subjek yang dipisahkan dari ruang politik (*self-interest*) yang melingkupi dirinya. Edwards menawarkan melihat masyarakat sipil—dan NGO sebagai unsur signifikan di dalamnya—sebagai sebuah arena dimana ada perbedaan dan pertarungan agenda dan kepentingan.²⁷

Perkembangan tatanan internasional membawa kita pada era gerakan sosial global sebagai ujung tombak advokasi sosial. Gerakan transnasional ini adalah gerakan lingkungan seperti Greenpeace & WWF lalu gerakan HAM (Mayo, 2005), gerakan perempuan, gerakan keadilan sosial global, gerakan islam (Moghadam, 2009). Gerakan ini melakukan kerja-kerja advokasi dengan basis kerja, aktivis, relawan, dan sumber daya di banyak wilayah. Tidak semuanya memiliki bentuk fisik organisasi sebagai wadah, dimana banyak dari mereka bergerak dengan model jejaring atau *network* (Atoy Quayson & Girish Daswani, 2013).

Ada perdebatan menarik terkait bentuk baru solidaritas-solidaritas global. Valentine Moghadam memetakan perdebatan ini dengan memaparkan dua model *global movement* yaitu; Jaringan advokasi transnasional atau *Transnational Advocacy*

²⁷ *Ibid* Marjorie Mayo hal 3-4

Network dan Gerakan sosial transnasional atau *Transnational Social Movement*. Jaringan advokasi transnasional adalah bentuk baru gerakan global yang tidak terlalu birokratis (tidak memutlakkan syarat adanya organisasi formal sebagai wadah) dan disatukan oleh persamaan nilai dan cita-cita/visi yang bertumpu pada perukaran informasi dan pelayanan yang cukup intens. Jaringan advokasi transnasional ini juga terkadang disebut jaringan solidaritas internasional yang bisa muncul kapan saja untuk menanggapi suatu isu tertentu. Sementara, lanjut Moghadam, gerakan sosial transnasional dipahami sebagai sebuah upaya mobilisasi massa yang menyatukan/menggerakkan manusia dari tiga atau lebih negara dalam interaksi yang bertentangan dengan elit politik, organisasi internasional, dan korporasi multi nasional.²⁸

Proyeksi perdebatan tersebut sebenarnya menyiratkan bahwa respon masyarakat global hari ini terhadap berbagai bentuk permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik telah mengambil bentuk transnasional nya. Dua bentuk gerakan global tersebut sebenarnya tidak berbeda secara kaku dan tetap saling berhubungan dan beririsan. Gerakan sosial transnasional bisa menggunakan strategi dan varian bentuk jaringan advokasi transnasional dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya,

²⁸ Valentine M. Moghadam, *Globalization and Social Movements: Islamism, Feminism, and The Global Justice Movement*, hal

pembahasan teori gerakan sosial akan berfokus pada aspek motivasi dan cara gerakan sosial mengembangkan gerakannya melalui proses transnasionalisasi.

Contoh pertama gerakan sosial transnasional yang melakukan transnasionalisasi adalah gerakan lingkungan atau biasa disebut *green movement*. Dua gerakan yang diangkat oleh Marjorie Mayo (2005) adalah “Friends of the Earth” dan “Greenpeace”. Friends of the Earth yang berdiri pada awal tahun 1970 di United Kingdom memiliki metode bekerja yang menekankan desentralisasi gerakan dan pelibatan partisipasi masyarakat di akar rumput melalui pendirian kelompok lokal (dimana anggotanya banyak diisi oleh anak muda). Di sisi lain, Greenpeace memiliki cara kerja yang lebih sentralistis dimana pengambilan keputusan diambil saat-saat forum terpusat. Namun, karakteristik yang sama pada gerakan lingkungan ini adalah mereka dapat meng-globalkan gerakannya melalui mobilisasi sumber daya yang massif dan intens.²⁹ Kunci utama adalah melakukan *framing* isu dan menyebarkannya melalui kampanye yang massif lewat berbagai media. Saat memiliki semakin banyak cabang dan wilayah kerja, Greenpeace misalnya, rutin melakukan forum-forum internasional untuk merumuskan gerakan dan pembacaan situasi yang

²⁹ Marjorie Mayo, *Global Citizens: Social Movements & The Challenge of Globalization*, hal 65-72

mempertemukan aktivis lintas negara-bangsa. Kedua gerakan ini juga dengan aktif membangun jaringan dengan organisasi lingkungan lain dan gerakan sosial di luar isu lingkungan (Mayo, 2005).

Contoh gerakan sosial transnasional lain adalah gerakan yang mengadvokasi isu HAM yaitu Amnesty International. Gerakan ini didirikan pada tahun 1961, oleh Peter Benenson, dimana gerakan ini sejak awal berfokus pada pembebasan para tahanan yang dihukum karena keyakinan dan identitasnya—ideologi politik, etnis, orientasi seksual, warna kulit, agama, dan bahasa—dan berkembang pesat dengan melibatkan banyak figur dan tokoh (baik aktivis maupun para tahanan) di berbagai negara.³⁰ Gerakan ini juga berkembang dengan memberikan “otonomi” pada tiap wilayah/negara untuk mendirikan cabang masing-masing sehingga bisa lebih optimal bekerja. Kampanye dan penggunaan media juga menjadi senjata utama Amnesty International dalam meng-globalkan gerakannya. Mayo menambahkan, bahwa baik Amnesty International maupun Friends of the Earth dan Greenpeace dihidupi oleh sumbangan dari anggota/relawannya dan juga sumbangan melalui jaringan yang lebih luas.³¹

³⁰ *Ibid* Marjorie Mayo hal 65-72

³¹ *Ibid* Marjorie Mayo hal 69

Kerja gerakan sosial transnasional ini mendapat kritik dari Jordan dan Maloney (1997: 19) yang menyatakan bahwa ketiga gerakan ini tidak bisa dikatakan desentralistis, non-hirarkis, dan partisipatif mengingat secara praktis ketiga gerakan ini memiliki skala dan jaringan yang luar biasa besar.

Gerakan sosial terakhir yang secara teoritis akan dikupas akar transnasionalisasinya adalah gerakan sosial islam (islam politik). Pemaparan teori ini akan mengacu pada buku Valentine M. Moghadam yang berjudul “*Globalization & Social Movements: Islamism, Feminism, and The Global Justice Movement*” yang memberikan porsi penjelasan tentang gerakan islam politik dan transnasionalisasi gerakannya secara cukup komprehensif. Moghadam memberikan penjelasan yang cukup rinci tentang berbagai varian dalam gerakan islam politik mulai dari yang ekstrimis, radikal, moderat, hingga yang liberal.

Islam politik yang termanifestasi ke dalam berbagai gerakan jihad bersenjata—seperti Al-Qaeda, Hamaz, dan Hezbollah—mengidentifikasi motivasi gerakannya didasarkan pada dua landasan; Pertama, ekspresi bahwa islam sedang dalam bahaya—baik secara kultural maupun struktural—lalu yang kedua tertutupnya ruang dikarenakan negara yang

represif.³² Hal ini sesuai dengan definisi islamisme menurut filsuf politik Suriah Sadik Al-Azm yang mengartikan islamisme sebagai ideologi mobilisasi yang sangat militan dimana ruh gerakannya bersumber pada tafsir atas ayat suci Al-Qur'an, cerita-cerita dan sejarah dalam islam, dan dicampur dengan ekspresi penderitaan kontemporer yang semua itu membawa penganutnya pada anggapan bahwa tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang "islami" sudah digerus oleh peradaban barat dan mensyaratkan mereka untuk melawan. Lebih jauh lagi, Sadik menilai bahwa ideologi ini diterapkan dalam praktik dengan menghidupkan kembali konsep awal jihad dalam islam yang begitu agresif dan keras terhadap segala bentuk penistaan pada agama seperti; pemujaan pada Tuhan yang banyak, kemurtadan, atheisme, seks bebas, dan segala macam bentuk kekafiran yang semua ini dianggap sebagai ke-*jahiliyahan* pada abad 20.³³

Tipologi islam politik selain yang ekstrim yaitu radikal. Islam politik radikal pada dasarnya didorong oleh motivasi yang sama untuk melakukan *islamisasi* terhadap masyarakat misalkan menuntut hukuman mati bagi penista simbol agama seperti kasus Salman Rusdhie yang difatwa hukuman mati oleh Ayatullah Khomeini (Hizbut tahrir bisa dikategorikan dalam

³² *Ibid* Valentine M. Moghadam hal 40-44

³³ *Ibid* Valentine M Moghadam, hal 40

kelompok ini). Gerakan islam radikal ini bisa berubah metode menjadi gerakan bersenjata saat ruang politik mereka ditutup sama sekali sehingga membuat mereka tidak memiliki pilihan—misal dalam konteks melawan penjajah seperti Hezbollah di Lebanon dan Hamaz di Palestina.³⁴

Tipologi selanjutnya yaitu islamisme/islam politik moderat. Kelompok yang termasuk ini tidak memilih jalan kekerasan, dan sebaliknya, justru mengikuti aturan politik demokratis yang ada dan mencoba mempengaruhi kebijakan dengan mendirikan partai politik sendiri—seperti PKS di Indonesia, AKP di Turki, Muslim Brotherhood di Mesir, dan Islah of Yemen di Yaman.³⁵ Namun, motivasi islamisasi dan ekspresi bahwa islam sedang tertindas juga dikemukakan oleh islam politik moderat ini. Di luar ketiga tipologi, ada tipologi keempat yang disebut islam politik liberal/demokratis.

Apabila merujuk pada ilmuwan, maka intelektual muslim Pakistan bernama Fazlur Rahman masuk dalam kategori pengusung islam politik liberal ini. Apabila merujuk pada gerakan/organisasi/jaringan, maka berbagai macam gerakan yang mencoba meng-kontekstualisasikan tafsir-tafsir dan ajaran islam dengan ide-ide kosmopolitan (seperti demokrasi, multikulturalisme, kesetaraan gender, HAM, dll) dapat

³⁴ *Ibid* Valentine Moghadam, hal 37-38

³⁵ *Ibid* Valentine Moghadam, hal 37-38

dikategorikan ke dalamnya. Contoh gerakan tersebut adalah Sister In Islam (SIS) di Malaysia, Muslim Wake-up, the Free muslim, Asma society, dan Center for Study of Islam and Democracy yang berbasiskan di Washington DC.³⁶

Gerakan-gerakan di atas melakukan transnasionalisasi gerakannya dipicu berbagai alasan dan melalui berbagai metode. Ide besar bahwa islam sebagai agama sedang mengalami bahaya—bahaya secara kultural karena budaya barat telah menggerus dan merusak moral umat islam dan bahaya secara struktural karena tatanan ekonomi global telah menciptakan ketimpangan ekonomi besar di negara-negara mayoritas muslim—yang mereka yakini dengan referensi buku Sayyid Qutb yang berjudul *Jahilliyat al-Qarn al-ishrin* atau “Kejahiliah di abad 20” telah berkontribusi besar dalam mendorong mobilisasi umat islam lintas negara untuk bergabung dengan kelompok jihad.³⁷ Lalu, peristiwa geopolitik 9/11 yang disusul oleh invasi US ke Iraq pada tahun 2003 juga berkontribusi besar memperbesar arus transnasionalisasi islam politik ekstrimis/jihadis.

Faktor lain yang mendorong semakin kuatnya transnasionalisasi islam politik adalah fenomena migrasi warga negara-negara mayoritas muslim (termasuk Indonesia) ke

³⁶ *Ibid* Valentine Moghadam, hal 39-40

³⁷ *Ibid* Valentine Moghadam, hal 46-47

berbagai belahan dunia.³⁸ Pada titik inilah peneliti menemukan kerangka teoritis yang pas untuk dipakai melihat kebijakan internasionalisasi Muhammadiyah lewat pengembangan cabang di luar negeri. Secara sadar, peneliti mengkategorikan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam politik liberal/demokratis mengingat karakter yang serupa; memilih jalan non-kekerasan, demokratis, adaptif terhadap nilai-nilai kosmopolitan liberal, namun tidak mewujudkan gerakannya dalam bentuk partai politik. Faktor migrasi kader Muhammadiyah yang merupakan salah satu alasan diberlakukannya kebijakan internasionalisasi Muhammadiyah dilihat peneliti sesuai dengan faktor migrasi yang mendorong proses transnasionalisasi gerakan islam politik (termasuk islam politik demokratis seperti Muhammadiyah) menurut Valentine M. Moghadam. Sebagai tambahan, peneliti juga menyoroti bahwa pola transnasionalisasi yang dialami oleh gerakan islam politik demokratis seperti Muhammadiyah lebih fleksibel dikarenakan keadaptifan Muhammadiyah pada nilai-nilai kosmopolitan liberal sehingga tidak memunculkan konfrontasi dengan banyak negara dan membuat mereka mudah diterima di berbagai belahan dunia. Tentunya, perkembangan teknologi informasi dan semakin hilangnya batas-batas antar negara-

³⁸ *Ibid* Valentine Moghadam, hal 47-48

bangsa—akibat diadopsinya kebijakan ekonomi politik neoliberalisme di mayoritas negara di seluruh dunia—juga berkontribusi besar pada proses dan pembentukan motivasi pada gerakan islam politik untuk melebarkan sayapnya.

2.3. Masyarakat Sipil

Dalam pengantar bukunya, *Administering Civil Society: Towards a Theory of State*, Mark Neocleous menjelaskan munculnya diskursus masyarakat sipil dalam analisa dinamika sosial dan politik adalah sebagai antitesa dari analisa yang menempatkan negara sebagai pusat episentrum.³⁹ Dalam bahasa yang serupa, Vedi Hadiz memaparkan kemunculan masyarakat sipil sebagai antitesa dari hegemoni kekuasaan negara pada ranah ekonomi, sosial, dan politik.⁴⁰ Vedi menjelaskan masyarakat sipil sebagai sebuah entitas sosial dan ekonomi yang memiliki daya tawar politik.

Masyarakat sipil dapat diartikan sebagai serangkaian kekuatan, kelompok, dan organisasi yang memiliki kekuatan sosial, politik, budaya, dan ekonomi.⁴¹ Dieter Gosewinkel mengatakan bahwa masyarakat sipil dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu kualitas/ciri spesifik dari suatu interaksi “sipil” atau sebagai sebuah ruang di tengah-tengah antara negara,

³⁹ Mark Neocleous, *Administering Civil Society: Towards a Theory of State*, (London, MACMILLAN PRESS LTD, 1996), dalam halaman pengantar

⁴⁰ Vedi Hadiz, *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi-Politik Indonesia Pasca Orde Baru*, (Jakarta, LP3ES, 2005)

⁴¹ *Ibid* Mark Neocleous, pengantar

ekonomi, dan privat dimana asosiasi mengorganisir dirinya dan bertindak secara terbuka dan mandiri.⁴²

Penjelasan lain tentang masyarakat sipil coba dilakukan oleh Leon E. Irish yang menjelaskan masyarakat sipil sebagai ekspresi dari aktualisasi hak-hak yang ada pada manusia secara holistik—hak untuk berkeyakinan, hak untuk berorganisasi, hak menyampaikan pendapat, hak untuk berkumpul, dll—dan organisasi masyarakat sipil dapat bergerak karena adanya hak-hak tersebut.⁴³ Leon mengatakan ada begitu banyak definisi, literatur, dan konteks yang berkaitan tentang masyarakat sipil. Leon memberi contoh dengan mengutip definisi masyarakat sipil menurut The London School of Economic Centre for Civil Society, yaitu sebuah arena aksi kolektif—tanpa paksaan—yang memiliki kesamaan kepentingan, tujuan, dan nilai.⁴⁴

Lebih jauh lagi, Leon mengatakan bahwa secara teoretis bentuk institusional dari masyarakat sipil berbeda dari negara, keluarga, dan pasar meski pada praktiknya batasan-batasan antara negara, masyarakat sipil, keluarga, dan pasar seringkali kompleks, simpang siru, dan saling berkelindan. Masyarakat sipil biasanya mencakup suatu ruang, institusi, dan aktor yang beragam yang bergantung pada tingkatan formalitas, otonomi,

⁴² Dieter Gosewinkel, sub-bab *Citizenship*, dalam Helmut K. Anheier, Stefan Toepler, Regina List (Eds), *International Encyclopedia of Civil Society*, (New York, Springer, 2010)

⁴³ Leon E. Irish, sub-bab *Civil Law and Civil Society*, dalam Helmut K. Anheier, Stefan Toepler, Regina List (Eds), *International Encyclopedia of Civil Society*, (New York, Springer, 2010)

⁴⁴ *Ibid* Leon E. Irish

dan kekuasaannya. Contoh kelompok yang biasanya dikategorikan sebagai masyarakat sipil adalah organisasi *charity*, LSM, organisasi perempuan, komunitas, organisasi agama, asosiasi profesional, serikat dagang, gerakan sosial, asosiasi bisnis, dan kelompok advokasi.⁴⁵

Dirk Lange, dalam tulisannya tentang *Civic Education & Civil Society*, menjelaskan bahwa proses pedagogis pembentukan kesadaran kewargaan hanya bisa dilakukan dengan pembentukan prakondisi aktifnya masyarakat sipil.⁴⁶ Dirk mengatakan bahwa masyarakat sipil mendasarkan dirinya institusi dan NGO yang beragam, kebebasan berasosiasi bagi warganya, komitmen menjaga kebebasan ini dari intervensi negara. Yudhishtir Raj Isar yang mengelaborasi relasi antara budaya dan masyarakat sipil, mengutip Anheier (2007) saat mendefinisikan masyarakat sipil sebagai suatu ruang yang terletak di antara negara dan pasar dan ruang ini berfungsi sebagai penengah yang akan melakukan *check and balance* sehingga tidak ada di antara negara dan pasar yang menjadi terlalu kuat/dominan.⁴⁷

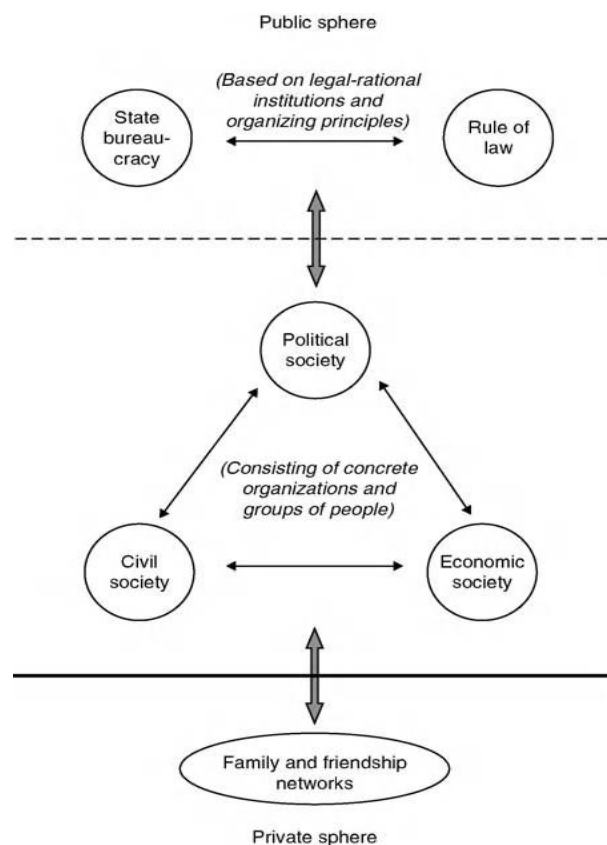
Pendekatan lain dalam menjelaskan masyarakat sipil juga dilakukan oleh Marc Morje Howard. Howard mencoba

⁴⁵ *Ibid* Leon E. Irish

⁴⁶ Dirk Lange, *Civic Education & Civil Society*, dalam Helmut K. Anheier, Stefan Toepler, Regina List (Eds), *International Encyclopedia of Civil Society*, (New York, Springer, 2010)

⁴⁷ Yudhishtir Raj Isar, *Civil Society and Culture*, dalam Helmut K. Anheier, Stefan Toepler, Regina List (Eds), *International Encyclopedia of Civil Society*, (New York, Springer, 2010)

menjelaskan masyarakat sipil sebagai bagian dari suatu diskursus yang lebih besar; demokrasi dan demokratisasi. Howard menyadari bahwa istilah masyarakat sipil telah digunakan dalam diskursus akademik, jurnalistik, dan kehidupan sehari-hari serta digunakan dalam banyak konteks di berbagai belahan dunia. Untuk menjelaskan masyarakat sipil dalam konteks konsolidasi demokrasi, ruang sosial dibagi ke dalam lima arena: 1) masyarakat sipil, 2) masyarakat politik, 3) masyarakat ekonomi, 4) supremasi hukum/*rule of law*, 5) birokrasi negara (Juan linz & Alfred stephan, 1996).



Figur 1: arena demokratisasi (Howard, 2003)

Pemisahan kaku antara masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan masyarakat politik di satu sisi, dan negara beserta aparatur institusionalnya di sisi lain pada awalnya cukup mendapat porsi yang kuat dalam studi ilmu politik dan demokrasi. Masyarakat sipil merujuk pada organisasi, asosiasi, dan kelompok sosial yang secara formal cukup mapan, secara legal dilindungi, dan secara independen dan kerelawanan digerakkan oleh warga biasa. Masyarakat ekonomi merujuk pada berbagai macam entitas bisnis yang berkompetisi mengejar profit dan akumulasi modal dalam sistem kapitalis. Lalu masyarakat politik merujuk pada sekelompok elit politik yang berkompetisi untuk suatu kekuasaan politik dan kursi dalam roda kekuasaan. Meskipun ketiga kategori kekuatan ini berada dalam satu ruang sosial berdasarkan gambar di atas, tapi ada perbedaan mendasar antara masyarakat sipil di satu sisi dan masyarakat ekonomi dan politik di sisi lain. Perbedaan itu ada pada peluang dan akses “warga biasa” dalam menggerakkan masyarakat sipil dimana ini tidak terjadi pada masyarakat ekonomi dan politik yang digerakkan oleh segelintir elit aktornya.⁴⁸

Kelompok yang dapat dikategorikan dalam masyarakat sipil menurut Howard seperti: kelompok atau gerakan HAM, lingkungan, perdamaian/*peace movement*, gerakan pendidikan, kebudayaan, organisasi agama, kelompok olah raga, gerakan

⁴⁸ Marc Morje Howard, *Democracy and Civil Society*, dalam Helmut K. Anheier, Stefan Toepler, Regina List (Eds), *International Encyclopedia of Civil Society*, (New York, Springer, 2010)

perempuan, kelompok veteran, gerakan kepemudaan, kelompok difabel, organisasi advokasi hak hewan, dan gerakan pengusung isu kesehatan.⁴⁹

Definisi lain tentang masyarakat sipil yaitu sebuah tindakan/aksi membangun komunitas/gerakan dalam masyarakat yang demokratis yang secara ideal mencoba mencakup aspirasi plural sebuah diskursus, dan mendorong orang-orang untuk mengakumulasi modal yang dimiliki manusia dalam atmosfer yang tanpa paksaan dan dengan semangat kooperasi (Patten, 2002).⁵⁰ Dalam perspektif ekonomi, konstruksi masyarakat sipil dalam ruang publik dan privat dilihat sebagai sebuah respon untuk menutupi kegagalan dari suatu sektor tertentu. Misalkan, negara yang gagal menyediakan *public good* bagi warganya menemukan tekanan dari sektor privat atau bahkan pemenuhan public good diambil oleh sektor privat itu sendiri. Begitu juga sebaliknya saat sektor privat gagal memenuhinya, maka negara hadir untuk memenuhinya dimana ini semua digerakkan oleh permintaan konsumen. Hal ini yang disebut Weisbrod (1977) sebagai model ekonomi oportunistik dalam masyarakat sipil.⁵¹

Definisi lain—namun berkelindan dengan penjabaran-penjabaran sebelumnya—diajukan oleh Jurgen Habermas (1992,

⁴⁹ *Ibid* Marc Morje Howard

⁵⁰ Lisiunia A. Romanienko, *Civil Society and Economy*, dalam Helmut K. Anheier, Stefan Toepler, Regina List (Eds), *International Encyclopedia of Civil Society*, (New York, Springer, 2010)

⁵¹ *Ibid* Lisiunia A. Romanienko

1998) yang menganggap masyarakat sipil sebagai sebuah ruang publik yang juga dapat diartikan sebagai berbagai macam bentuk relasi dan komunikasi antar warga yang bisa saja dimungkinkan oleh hukum atau kebijakan yang berlaku namun tidak terbatas pada itu saja (Dewey, 1927; Fraser, 1992; Edwards, 2004).⁵²

Masyarakat sipil pada literatur lain diartikan sebagai kelompok non-negara atau privat yang bekerja secara independen dari negara untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hak-hak, kebebasan, dan kepentingan warga (Bernhard, 1993).⁵³ Teori ini berpijak pada dikotomi ketat antara negara dan sektor non-negara/sipil yang banyak didorong oleh intelektual liberal, sebagaimana Wood (1990: 60-64) melihat masyarakat sipil sebagai sebuah arena politik di luar negara.⁵⁴ Para pemikir liberal ini melihat masyarakat sipil sebagai entitas sosial yang berposisi pada berbagai jenis otoritarianisme/totalitarianisme, kesewenangan penguasa, dan kediktatoran militer.

Gelner (1994: 5) mendefinisikan masyarakat sipil sebagai institusi non-pemerintah yang cukup kuat untuk mengimbangi pemerintah, dimana meskipun mereka tidak menghalangi pemerintah dalam memenuhi kewajibannya dalam menjaga

⁵² Mary Kay Gugerty & Travis Reynolds, *Civil Society and Ethnicity*, dalam Helmut K. Anheier, Stefan Toepler, Regina List (Eds), *International Encyclopedia of Civil Society*, (New York, Springer, 2010)

⁵³ Bab 1, Fahimul Quadir dan Jayant Lele, *Introduction: Globalization, Democracy, and Civil Society after The Financial Crisis of the 1990s*, dalam Fahimul Quadir dan Jayant Lele (Eds), *Democracy and Civil Society in Asia: Volume 1*, (New York, PALGRAVE MACMILLAN, 2004),

⁵⁴ *Ibid* Bab 1, Fahimul Quadir dan Jayant Lele

kedamaian dan penengah antar kepentingan besar, namun ia memiliki kapasitas untuk mencegah negara untuk mendominasi masyarakat.⁵⁵ Bratton (1994: 59), masih dalam koridor pendefinisian yang serupa, menambahkan bahwa tujuan utama dari masyarakat sipil yang aktif adalah untuk memastikan kewenangan pemerintah benar-benar dijalankan berdasarkan penerimaan warga secara luas.⁵⁶

Dari semua pemaparan teori tentang masyarakat sipil di atas, maka Muhammadiyah dengan upaya internasionalisasinya dapat dikategorikan sebagai masyarakat sipil yang berperan dalam diskursus sosial, budaya, ekonomi, agama dan politik global. Peran aktif Muhammadiyah dengan persebaran cabang ke berbagai belahan dunia—yang secara otomatis juga merupakan persebaran nilai dan praktek perjuangan—dan partisipasi aktif Muhammadiyah dalam berbagai jaringan gerakan lintas ideologi dan isu yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan politik negara-negara di dunia (khususnya Indonesia) memenuhi syarat Muhammadiyah sebagai suatu entitas masyarakat sipil. Dalam konteks globalisasi dan transnasionalisme gerakan, Muhammadiyah dapat dianggap sebagai bagian dari *global civil society*.

⁵⁵ *Ibid* Bab 1, Fahimul Quadir dan Jayant Lele hal 7

⁵⁶ *Ibid* Bab 1, Fahimul Quadir dan Jayant Lele hal 7